

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Menurut Kansil, otonomi daerah diartikan sebagai hak, kekuasaan, serta kewajiban suatu daerah, untuk mengatur dan mengurus daerahnya sendiri, sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan hak, wewenang serta kewajiban itu, maka daerah berhak merumuskan kebijakan daerahnya sendiri. Tujuan dari kebijakan daerah adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Melalui pemberian pelayanan, partisipasi yang lebih besar, prakarsa dan pemberdayaan masyarakat (Widjaja, 2007). Dengan demikian otonomi daerah dilaksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan pelayanan publik dan mendorong pembangunan ekonomi daerah (Mardiasmo, 2002).

Kemajuan perekonomian daerah dapat dilihat melalui hasil kinerja pemerintah dalam mengelola keuangan daerah. Ketika keuangan daerah dikelola dengan maksimal untuk meningkatkan pelayanan publik, maka tujuan kesejahteraan masyarakat dapat dicapai. Tindakan yang dapat dilakukan yaitu memastikan bahwa anggaran yang tersedia dapat dialokasikan tepat sasaran untuk membiayai program kerjanya. Anggaran memiliki dua fungsi. Pertama berfungsi sebagai alat kontrol dan yang lainnya berfungsi sebagai alat perencanaan. Anggaran sebagai alat perencanaan, dapat dipahami menjadi alat atas anggaran yang tersedia, dan harus dilaksanakan oleh pemerintah. Anggaran menjadi alat kontrol menunjukkan distribusi dana publik yang disetujui oleh legislatif untuk pengeluaran.

APBD adalah rencana fiskal tahunan pemerintah daerah yang telah disetujui oleh DPRD. APBD dapat digunakan sebagai pedoman penilaian kesesuaian kegiatan regulasi pemerintah daerah dengan persyaratan regulasi. APBD disusun berdasarkan Rencana Kerja dan Anggaran. RKA merupakan dokumen mengenai perencanaan dan penganggaran. Didalamnya berisi mengenai rencana penerimaan, diikuti oleh rencana pengeluaran untuk program dan kegiatan SKPD, serta rencana keuangan.

Dalam penyelenggaraan APBD masih terdapat berbagai kendala seperti penyerapan anggaran. Kemampuan lembaga dalam memaksimalkan penggunaan sumber dana yang ada merupakan kemampuan penyerapan anggaran. Dapat dikatakan bahwa kemampuan dalam menyerap anggaran adalah salah satu indikator yang mengukur keberhasilan atau kegagalan pemerintah dalam implemmentasi rencana kinerjanya.

Kementerian Dalam Negeri meminta seluruh pemerintah daerah agar membentuk tim pendamping untuk mempercepat penyerapan APBD. Berdasarkan surat kepada seluruh Gubernur dan Direksi/Walikota Indonesia, tercatat per 30 September 2020, rata-rata konsumsi APBD secara nasional masih lebih rendah dari rata-rata penyerapan APBN, yakni sebesar 60,77%. Rata-rata tingkat penyerapan APBD oleh pemerintah provinsi masih 54,93 dan kabupaten/kota 50,60%. (Imandiar, Yudistira. 2020)

Penyerapan anggaran daerah berasal dari akumulasi kemampuan menyerap anggaran masing-masing SKPD. Oleh karena itu, penggunaan anggaran dapat memberikan gambaran tentang kemampuan pemerintah daerah dalam melaksanakan serta memaknai setiap kegiatan yang telah direncanakan.

Dengan demikian, pemanfaatan anggaran dapat memberikan gambaran tentang kemampuan pemerintah daerah dalam menjalankan dan bertanggung jawab atas semua kegiatan yang direncanakan (Mardiasmo, 2009).

Dapat dikatakan bahwa penyerapan anggaran adalah salah satu tolak ukur efektivitas pemerintah dalam mengelola perekonomian. Jika melihat tingkat penggunaan anggaran, dapat dijadikan sebagai indikator untuk mengevaluasi hasil kerja pemerintah. Berikut ini disajikan realisasi anggaran Pemerintah Kabupaten Sleman tahun 2019-2020 berdasarkan realisasi pendapatan, belanja operasional, belanja modal dan pembiayaan dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 1.1 Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Sleman tahun 2019

No.	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Pendapatan	2.779.380.276.199,62	2.840.636.285.803,45	102,20
2.	Belanja Operasional	2.203.854.760.929,44	1.986.041.696.572,86	90,12
3.	Belanja Modal	558.596.060.573,79,40	451.531.360.857,47	80,83
4.	Pembiayaan Netto	333.006.566.398,15	334.944.066.398,15	100,58

Sumber : Laporan Realisasi anggaran BKAD Kabupaten Sleman Tahun 2019, diolah

Berdasarkan tabel 1.1 diatas, dapat dilihat realisasi anggaran belanja Pemerintah Kabupaten pada tahun 2019. Realisasi belanja operasional mencapai sebesar 90,12% dari anggaran. Kemudian untuk realisasi belanja modal sebesar 80,83% dari anggaran. (Laporan Realisasi Anggaran BKAD Kabupaten Sleman Tahun 2019).

Tabel 1.2 Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Sleman tahun 2020

No.	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Pendapatan	2.538.365.662.110,00	2.541.050.870.612,73	100,11
2.	Belanja Operasional	2.143.876.248.853,99	1.952.369.307.358,01	91,07
3.	Belanja Modal	397.323.982.405,13	361.066.768.091,58	90,87
4.	Pembiayaan Netto	369.726.650.741,78	371.664.150.741,78	100,52

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran BKAD Kabupaten Sleman Tahun 2020, diolah

Berdasarkan tabel 1.2 diatas, dapat dilihat realisasi anggaran belanja Pemerintah Kabupaten Sleman pada tahun 2020. Realisasi belanja operasional sebesar 91,07% dari anggaran. Sedangkan realisasi belanja modal sebesar 90,87% dari anggaran. (Laporan Realisasi Anggaran BKAD Kabupaten Sleman Tahun 2020)

Berdasarkan laporan realisasi tersebut pola penyerapan anggaran mengalami kenaikan pada tahun 2020. Realisasi belanja operasional sebelumnya sebesar 90,12% kemudian naik menjadi 91,07% dan realisasi belanja modal sebesar 80,83% naik menjadi sebesar 90,87%

Berikut ini merupakan tingkat penyerapan anggaran Pemerintah Kabupaten Sleman yang bisa dilihat pada grafik berikut.



Sumber: <https://dash.slemankab.go.id> dan diolah

Berdasarkan grafik diatas, terlihat tingkat pola penyerapan anggaran Pemerintah Kabupaten Sleman yang terus mengalami peningkatan pada setiap bulannya. Penyerapan anggaran pada bulan awal cenderung masih rendah, namun terus mengalami kenaikan di bulan-bulan berikutnya. Tingkat penyerapan



anggaran dalam proses pelaksanaannya dipengaruhi beberapa faktor. Beberapa penelitian sebelumnya, telah membahas faktor-faktor yang memengaruhi penyerapan anggaran, seperti penelitian yang dilakukan oleh Ulfa (2017) yang menyatakan bahwa secara simultan perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, kualitas sumber daya manusia dan pengadaan barang dan jasa berpengaruh signifikan terhadap penumpukan penyerapan anggaran belanja daerah di akhir tahun anggaran. Secara parsial perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, kualitas sumber daya manusia dan pengadaan barang dan jasa berpengaruh negatif signifikan terhadap terhadap penumpukan penyerapan anggaran belanja daerah di akhir tahun anggaran.

Zarinah, et al. (2016) hasil penelitiannya menunjukkan bahwa perencanaan anggaran memiliki dampak positif dan signifikan terhadap penyerapan anggaran. Sebagaimana penelitian Malahayati, et al. (2015) dan Nugroho & Alfarisi (2017). Namun berlawanan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Salwah (2019), Ulandari, et al. (2021) dan Rahmawati & Ishak (2020), Ulfa (2017) yang menyatakan bahwa perencanaan anggaran tidak berpengaruh terhadap penyerapan anggaran.

Kualitas sumber daya manusia berpengaruh positif signifikan terhadap penyerapan anggaran, terbukti dari penelitian Zarinah, et al. (2016), Anisa (2017) & Malahayati, et al. (2015). Berlawanan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Nugroho & Alfarisi (2017), Rahmawati & Ishak (2020), serta Alumbida, et al. (2016) Ulfa (2017) bahwa kualitas sumber daya manusia tidak berpengaruh terhadap penyerapan anggaran.

Penelitian Rahmawati & Ishak (2020), Ulandari, et al. (2021) dan Alumbida, et al. (2016) menunjukkan pengadaan barang dan jasa berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan anggaran. Namun berlawanan dengan penelitian yang dilakukan Nugroho & Alfarisi (2017) dan Ulfa (2017) bahwa pengadaan barang dan jasa tidak berpengaruh terhadap penyerapan anggaran.

Hasil riset yang tidak konsisten, mendorong Peneliti untuk melakukan penelitian serupa terhadap faktor-faktor yang memengaruhi penyerapan anggaran. Berdasarkan fenomena pola penyerapan anggaran Pemerintah Kabupaten Sleman yang terjadi cenderung rendah di awal dan terus mengalami peningkatan bulan-bulan selanjutnya, maka Penulis tertarik memilih objek penelitian yaitu organisasi perangkat daerah (OPD) di Kabupaten Sleman. Sehubungan dengan penelitian tersebut, maka judul yang diangkat peneliti dalam penulisan skripsi adalah "Pengaruh Perencanaan Anggaran, Kualitas Sumber Daya Manusia Serta Pengadaan Barang Dan Jasa Terhadap Penyerapan Anggaran Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Sleman".

Variabel yang digunakan, adalah persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya. Penelitian ini menggunakan 3 (tiga) variabel bebas, diantaranya yaitu Perencanaan Anggaran (X1), Kualitas SDM (X2) serta Pengadaan Barang dan Jasa (X3).

Penelitian ini adalah replikasi penelitian Ulfa (2017) dengan objek dan data yang berbeda. Penelitian ini menggunakan objek penelitian, yaitu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Sleman serta tahun pelaksanaan penelitian juga berbeda.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan, maka perlu dirumuskan suatu masalah yang akan dipecahkan/diselesaikan pada penelitian/perancangan ini.

1. Apakah perencanaan anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan anggaran SKPD Kabupaten Sleman?
2. Apakah kualitas sumber daya manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan anggaran SKPD Kabupaten Sleman?
3. Apakah pengadaan barang dan jasa berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan anggaran SKPD Kabupaten Sleman?
4. Apakah perencanaan anggaran, kualitas sumber daya manusia, pengadaan barang dan jasa secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan anggaran SKPD Kabupaten Sleman?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

1. Untuk menguji secara empiris apakah perencanaan anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan anggaran SKPD Kabupaten Sleman.
2. Untuk menguji secara empiris apakah kualitas sumber daya manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan anggaran SKPD Kabupaten Sleman.
3. Untuk menguji secara empiris apakah pengadaan barang dan jasa berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan anggaran SKPD Kabupaten Sleman.

4. Untuk menguji secara empiris apakah perencanaan anggaran, kualitas sumber daya manusia, pengadaan barang dan jasa secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan anggaran SKPD Kabupaten Sleman.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

1. Bagi Instansi Pemerintah Kabupaten Sleman diharapkan dengan hasil penelitian ini dapat menjadi bahan masukan bagi pengambilan keputusan berkaitan dengan penyerapan anggaran untuk peningkatan pelayanan demi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Sleman.
2. Bagi Peneliti Selanjutnya hasil penelitian diharapkan dapat memberi tambahan pengetahuan dan menjadi bahan referensi untuk penelitian selanjutnya yang lebih mendalam.
3. Bagi Akademis Penelitian ini diharapkan dapat membantu meningkatkan pemahaman dan wawasan mengenai penulisan karya ilmiah. Menerapkan ilmu dan teori yang diperoleh di Universitas ke dunia kerja, dan membandingkan teori yang dipelajari dengan keadaan sebenarnya di lapangan. Mengetahui kebenaran tentang faktor-faktor yang memengaruhi penyerapan anggaran pada SKPD Kabupaten Sleman.